



ANALISIS LITERATUR TENTANG KEMISKINAN STRUKTURAL DI INDONESIA: PERSPEKTIF SOSIAL, EKONOMI DAN KEBIJAKAN PUBLIK

St Dinar Sulistiya Ningrum¹; Devi Fitri Rizki Yanti²

¹*Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia*

²*Ilmu Hukum, Universitas Tangerang Raya Banten, Indonesia*

¹*Correspondence Email: dsty22460@gmail.com*

Received: 15 Juli 2024	Accepted: 20 September 2024	Published: 25 September 2024
-------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

Abstract

This study aims to examine structural poverty in Indonesia through a multidimensional approach encompassing social, economic, and public policy perspectives. Utilizing a qualitative method through a Systematic Literature Review (SLR), this research analyzes various studies published over the last six years (2020–2025), sourced from the Dimensions and Scopus databases. The findings reveal that structural poverty cannot be separated from unequal social power relations, regional economic disparities, and public policies that remain non-inclusive. Contributing factors such as social stigma, discrimination against vulnerable groups, and weak public governance perpetuate cycles of injustice and vulnerability. Most previous studies have been fragmented and have not systematically integrated these three dimensions. This research fills that gap by offering a comprehensive literature analysis, providing a conceptual foundation for formulating transformative policies. The implications of the findings emphasize the urgency of cross-sectoral approaches that prioritize social justice, resource redistribution, and structural reforms in addressing poverty in a sustainable manner in Indonesia.

Keywords *Structural Poverty; Social Inequality; Public Policy.*

A. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan isu yang tidak boleh diabaikan di Indonesia, yang merupakan salah satu negara yang sedang berkembang. Walaupun Indonesia berhasil menurunkan jumlah orang miskin setiap tahunnya, Badan Pusat Statistik (2014) melaporkan bahwa sekitar 29,13 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 2012. Indeks kedalaman, indeks keparahan, dan gini ratio juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan (Sucipto et al., 2024).

Kemiskinan dapat dijelaskan sebagai situasi di mana individu atau kelompok, baik pria maupun wanita, tidak mendapatkan hak-hak dasar mereka untuk menjaga dan meningkatkan kehidupan yang bermartabat. Pemahaman tentang "kemiskinan" harus dimulai dari pendekatan yang berlandaskan hak. Dalam sudut pandang ini, penting untuk diakui bahwa semua anggota masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak-hak dasar yang setara. Selain itu, kemiskinan perlu dilihat sebagai masalah yang kompleks, tidak hanya dilihat dari sisi ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga dari kegagalan dalam memenuhi hak-hak dasar serta perlakuan yang berbeda terhadap individu atau kelompok dalam menjalani hidup secara bermartabat. (Bahri et al., 2024). Kemiskinan bukanlah sebuah isu yang mudah, tetapi sebuah kondisi rumit yang berhubungan dengan berbagai dimensi ekonomi, sosial, dan budaya. Maka dari itu, untuk menciptakan solusi yang tepat, kita harus menggali lebih dalam ke dalam sumber permasalahan tersebut (Pratama, 2023).

Kemiskinan struktural tidak semata-mata disebabkan oleh kelemahan individu, tetapi merupakan produk dari ketimpangan sosial yang terlembaga dalam sistem pendidikan, jenis pekerjaan, serta kualitas tata kelola pemerintahan. Ketimpangan ini menciptakan hambatan sistemik bagi kelompok masyarakat tertentu untuk mengakses sumber daya, kesempatan kerja, dan layanan publik secara setara (Ghosh et al., 2023). Di dalam struktur sosial yang timpang, peran negara dan institusi sangat menentukan apakah suatu kelompok dapat keluar dari siklus kemiskinan atau justru terjebak di dalamnya secara antargenerasi (Hümbelin et al., 2022).

Ketimpangan ekonomi merupakan salah satu faktor utama yang memperkuat kemiskinan struktural melalui mekanisme seperti transmisi pendidikan, pola migrasi, dan rendahnya mobilitas sosial. Anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah di Brasil cenderung memiliki tingkat

pendidikan yang lebih rendah, yang pada akhirnya membatasi peluang kerja dan memperkuat kemiskinan (Gomes et al., 2023). Di sisi lain, mobilitas antarwilayah seperti migrasi ke kota lebih banyak diakses oleh mereka yang berasal dari keluarga berpenghasilan tinggi, memperlebar jurang kesejahteraan (Bernard, 2023). Fenomena ini juga tercermin di negara maju seperti Amerika Serikat, di mana ketimpangan pendapatan tidak disertai dengan peningkatan mobilitas sosial (Beckfield, 2020).

Berbagai studi menunjukkan bahwa faktor sosial memainkan peran penting dalam membentuk kemiskinan struktural di berbagai konteks geografis. Di wilayah pedesaan, individu lanjut usia dan pekerja di sektor pertanian cenderung lebih rentan terhadap kemiskinan, sedangkan di daerah urban, kerentanan meningkat pada kelompok pekerja lepas dan imigran (Hümbelin et al., 2022). Tingkat pendidikan juga menjadi indikator penting: di distrik Birbhum, India, rendahnya tingkat literasi berbanding lurus dengan tingkat kemiskinan yang tinggi (Ghosh et al., 2023). Lebih lanjut, kualitas regulasi dan tata kelola publik terbukti menurunkan tingkat kemiskinan energi di Eropa (Certomà et al., 2023), sementara pembangunan infrastruktur di Almaty menunjukkan bahwa kebijakan negara yang responsif berperan penting dalam menanggulangi kemiskinan pedesaan (Kuzembekova & Zhanbyrbayeva, 2022).

Ketimpangan ekonomi juga mempengaruhi pola reproduksi sosial antar generasi. Rendahnya tingkat pendidikan dalam keluarga miskin berkontribusi terhadap terbatasnya akses anak-anak pada pekerjaan formal dan layak, yang akhirnya mempertahankan siklus kemiskinan (Gomes et al., 2023). Di negara-negara dengan ketimpangan tinggi, seperti Amerika Serikat, posisi sosial seseorang lebih banyak ditentukan oleh latar belakang keluarganya daripada oleh meritokrasi (Beckfield, 2020) & (Weirstrass et al., 2022). Bahkan, dalam konteks mobilitas sosial, anak dari keluarga kaya lebih mungkin bermigrasi ke kota untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang lebih baik, sementara anak dari keluarga miskin sering terjebak dalam pekerjaan informal atau musiman (Bernard, 2023).

Negara memiliki peran strategis dalam mengintervensi kemiskinan struktural melalui perbaikan kerangka hukum, distribusi anggaran sosial, dan kebijakan pendidikan. Sistem hukum yang ada sering kali justru melegitimasi ketimpangan dan membatasi akses kelompok miskin terhadap hak-haknya (Ribotta, 2023). Di Polandia, peningkatan alokasi anggaran

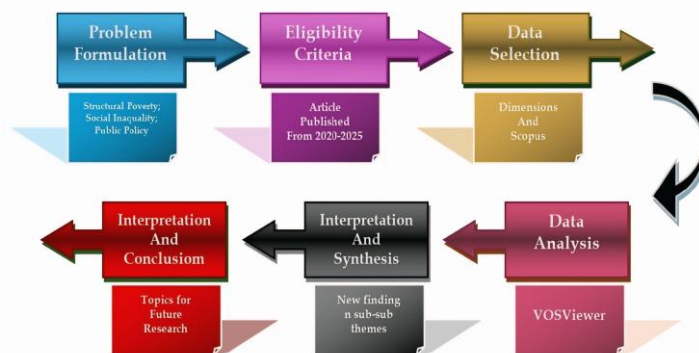
untuk bantuan sosial secara langsung berkorelasi dengan penurunan angka kemiskinan (Maj-Waśniowska & Stabryła-Chudzio, 2020), sedangkan secara global, implementasi komitmen pengentasan kemiskinan memerlukan sinergi antara pembiayaan negara dan partisipasi lokal (Pawar, 2023). Pendidikan sebagai alat kebijakan publik untuk mengatasi ketimpangan sosial, menurut Titton dan D'Agostini, sangat penting, namun harus lebih dari sekadar solusi jangka pendek yang bersifat paliatif (Titton & D'Agostini, 2020).

Meskipun banyak penelitian telah membahas dimensi sosial, ekonomi, dan kebijakan publik dalam isu kemiskinan struktural, masih terdapat kekosongan dalam pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan ketiganya secara simultan, terutama dalam konteks Indonesia. Sebagian besar studi terdahulu bersifat fragmentatif dan belum menggali secara mendalam bagaimana ketiga dimensi tersebut saling berinteraksi dalam menciptakan dan mempertahankan kemiskinan. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah tersebut dengan menyajikan analisis literatur yang menyeluruh dan terintegrasi. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan memahami kemiskinan struktural di Indonesia dari perspektif sosial, ekonomi, dan kebijakan publik secara holistik dan sistematis.

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR). Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpretasikan semua hasil penelitian yang relevan mengenai analisis literatur tentang kemiskinan struktural di Indonesia: perspektif sosial, ekonomi dan kebijakan publik. Pendekatan ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber yang relevan secara sistematis, sehingga dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai topik yang diteliti. Data dalam penelitian ini bersumber dari database Dimensions (<https://app.dimensions.ai>) dan Scopus (<https://www.scopus.com>) dengan interval publikasi 6 tahun terakhir untuk memastikan bahwa data yang digunakan adalah data terkini dan relevan dengan analisis literatur tentang kemiskinan struktural di Indonesia: perspektif sosial, ekonomi dan kebijakan publik.

Kriteria kelayakan data dalam penelitian ini ditetapkan untuk memastikan bahwa hanya literatur yang relevan dan berkualitas tinggi yang dianalisis. Kriteria tersebut meliputi (1) artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional dan internasional bereputasi; (2) studi yang secara khusus membahas analisis literatur tentang kemiskinan struktural di Indonesia: perspektif sosial, ekonomi dan kebijakan publik; (3) publikasi yang diterbitkan dalam 6 tahun terakhir (2020-2025); (4) artikel yang tersedia dalam bentuk teks lengkap dan dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Prosedur penelitian seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Prosedur penelitian

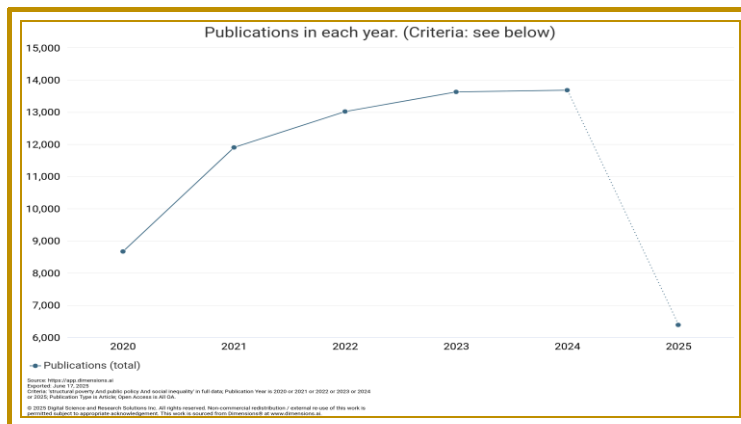
Gambar 1 menunjukkan bahwa penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu perumusan masalah, penentuan kriteria kelayakan, seleksi data, analisis data, interpretasi dan sintesis data, dan penarikan kesimpulan. Tahap perumusan masalah penting dilakukan untuk membatasi topik yang dibahas, yaitu analisis literatur tentang kemiskinan struktural di Indonesia: perspektif sosial, ekonomi dan kebijakan publik. Kriteria kelayakan ditentukan untuk menyaring data yang sesuai dengan topik dengan kata kunci yang relevan seperti “(Kemiskinan Struktural dan Ketimpangan Sosial dan Kebijakan Publik) atau (Structural Poverty and Social Inequality and Public Policy)”. Selanjutnya, data dipilih dari database Dimensi dan filter diterapkan untuk data yang diterbitkan dalam 6 tahun terakhir (2020-2025). Selanjutnya, data yang terkumpul diimpor ke dalam perangkat lunak VOSviewer untuk membuat visualisasi hubungan antara kata kunci dan tema dalam penelitian ini. Hasil visualisasi dan analisis data dari VOSviewer diinterpretasikan untuk menjelaskan variabel-variabel kunci

dalam analisis literatur tentang kemiskinan structural di Indonesia: perspektif sosial, ekonomi dan kebijakan publik

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

Hasil pencarian di database pengindeks menemukan total 641,103 data, meliputi data *open access* sebanyak 160,662 data dan sisanya adalah *close access*. Dari 160,662 data tersebut, terdapat 114,814 data merupakan artikel dan 67,300 data merupakan buku dan prosiding. Dengan demikian, terdapat 45,848 data yang akan dianalisis pada tahap selanjutnya. Sebaran jumlah data tersebut sesuai dengan Gambar 2.



Gambar 2. Distribusi jumlah data selama satu dekade

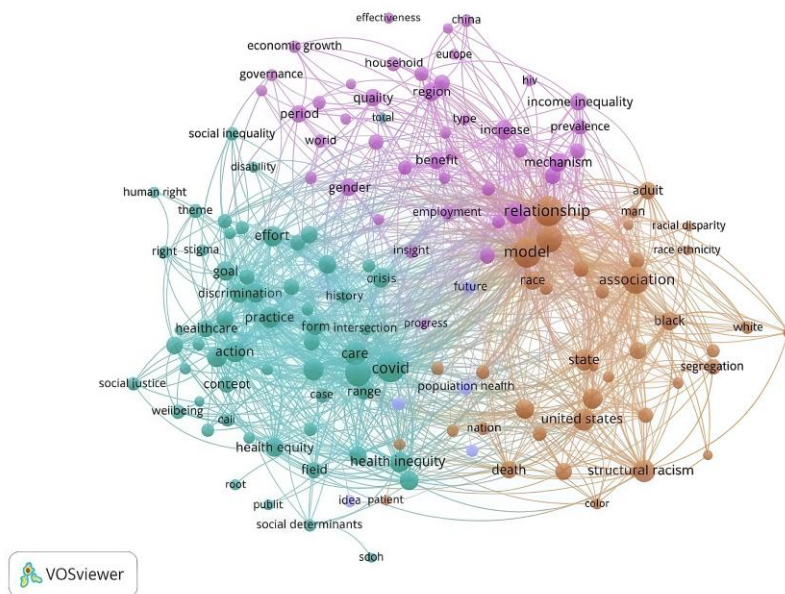
Gambar 2 menunjukkan bahwa perkembangan jumlah publikasi tahunan yang membahas *Multidimensional Poverty Index* (MPI) dan *Inclusive Development* selama periode 2020 hingga 2025. Data menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam jumlah publikasi dari tahun 2020 hingga mencapai puncaknya pada tahun 2023. Pada tahun 2020, publikasi tercatat sekitar 115 artikel, yang kemudian meningkat secara bertahap menjadi lebih dari 180 pada 2022 dan mencapai angka tertinggi mendekati 235 publikasi pada tahun 2023. Peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa isu multidimensi dalam pengukuran kemiskinan serta pentingnya pembangunan yang inklusif semakin mendapatkan perhatian dalam diskursus akademik global. Kecenderungan ini kemungkinan besar dipicu oleh desakan

internasional untuk mengintegrasikan aspek non-moneter dalam pengentasan kemiskinan, serta kebutuhan terhadap indikator yang lebih adil dan kontekstual dalam kebijakan pembangunan. Namun demikian, grafik juga menunjukkan adanya penurunan kecil pada tahun 2024 yang diikuti oleh penurunan tajam pada tahun 2025, di mana jumlah publikasi turun menjadi sekitar 120 artikel. Penurunan ini kemungkinan besar tidak merepresentasikan penurunan minat akademik terhadap isu ini, melainkan disebabkan oleh keterlambatan proses indeksasi atau belum lengkapnya data publikasi tahun berjalan dalam sistem basis data ilmiah.

Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa topik *Multidimensional Poverty Index* dan *Inclusive Development* telah berkembang menjadi isu penting dalam kajian akademik kontemporer. Lonjakan publikasi dalam tiga tahun berturut-turut menunjukkan adanya konsensus ilmiah atas pentingnya pendekatan yang lebih komprehensif dan adil dalam memahami serta menanggulangi kemiskinan. Penurunan pada tahun 2025 perlu ditafsirkan secara hati-hati dan tidak dijadikan indikator tunggal dalam mengukur relevansi topik ini ke depan.

2. Discussion

Data yang telah melalui proses seleksi kemudian divisualisasikan dengan menggunakan VOSviewer untuk melihat variabel-variabel penelitian dan hubungan antar variabel. Hasil visualisasi seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Network visualization dari variabel penelitian

Gambar 3 adalah visualisasi jaringan dari semua variable yang dipelajari selama 5 tahun terakhir dan menggambarkan empat kelompok warna yang berbeda: hijau, merah, kuning, dan biru. Interpretasi setiap variable adalah sebagai berikut.

a. **Klaster Ungu (Dimensi Ekonomi dan Geospasial)**

Klaster ini memuat kata kunci seperti *economic growth, region, governance, income inequality, gender, employment, quality, household, effectiveness*, yang menunjukkan fokus pada **struktur ekonomi, kebijakan pemerintahan, dan dinamika spasial ketimpangan**. Topik-topik ini banyak membahas *mekanisme struktural* yang memproduksi dan mereproduksi kemiskinan, seperti ketimpangan pendapatan, eksklusi pasar kerja, dan disparitas antarwilayah. Klaster ungu merepresentasikan domain ekonomi makro dan mikro, serta pendekatan kebijakan berbasis wilayah. Peneliti pada klaster ini mengevaluasi bagaimana kebijakan publik, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan akses terhadap sumber daya mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

b. **Klaster Oranye (Ras, Strukturalisme, dan Identitas Kolektif)**

Klaster oranye secara kuat berkaitan dengan *structural racism*, *race*, *state*, *association*, *black*, *white*, *segregation*, menyoroti isu-isu **rasial, etnisitas, dan ketidaksetaraan struktural yang dilembagakan dalam sistem sosial dan kebijakan negara**. Ini adalah wilayah penelitian yang fokus pada bagaimana rasisme sistemik dan politik identitas berkontribusi terhadap eksklusi sosial dan reproduksi kemiskinan, khususnya dalam konteks Amerika Serikat (*United States*) tetapi relevan secara konseptual secara global. Kajian dalam klaster ini mengangkat pentingnya pemahaman interseksional antara ras, negara, dan sistem kekuasaan yang bekerja secara implisit maupun eksplisit dalam menciptakan ketimpangan. Istilah *structural racism* menjadi pusat dari eksplorasi ini.

c. **Klaster Biru (Dimensi Sosial, Kesehatan, dan Keadilan)**

Klaster ini mendominasi isu-isu yang berkaitan dengan **disparitas sosial dan kesehatan, ketidaksetaraan, dan praktik sosial dalam kebijakan kesehatan**. Kata kunci seperti *health equity*, *discrimination*, *stigma*, *healthcare*, *practice*, *social justice*, *wellbeing* menunjukkan bahwa kajian dalam klaster ini menitikberatkan pada **perjuangan keadilan sosial**, terutama dalam konteks layanan kesehatan yang adil, isu diskriminasi berbasis identitas (gender, ras, disabilitas), dan krisis kesehatan (seperti COVID-19). Klaster biru memperlihatkan bahwa studi-studi dalam rumpun ini mengeksplorasi bagaimana struktur sosial menghasilkan ketimpangan kesehatan, bagaimana diskriminasi dan stigma memperburuk kerentanan kelompok tertentu, serta bagaimana praktik dan tindakan sosial dapat memperkuat atau melawan ketidakadilan tersebut.

Berdasarkan pembagian klaster, peneliti dapat melakukan kajian lebih mendalam terhadap beberapa topik sebagai berikut.

a. **Ketimpangan Sosial dan Kesehatan di Indonesia**

Stigma dan diskriminasi terbukti menjadi penghalang utama dalam akses layanan kesehatan, terutama bagi kelompok yang terpinggirkan secara sosial. Individu dengan kondisi seperti HIV/AIDS, gangguan kesehatan mental, dan disabilitas sering kali menghadapi hambatan

dalam memperoleh layanan medis akibat persepsi negatif dari masyarakat maupun tenaga kesehatan. Di Maroko, hampir 50% individu dengan HIV menghindari layanan kesehatan karena kekhawatiran terhadap stigma yang muncul dari keluarga dan penyedia layanan (Delabre et al., 2022). Fenomena serupa juga terjadi pada kelompok tunawisma, di mana tekanan psikologis akibat stigmatisasi memicu perasaan malu dan menarik diri dari lingkungan sosial, yang pada akhirnya memperburuk kondisi kesehatan mereka (Brito & da Silva, 2022). Kelompok marjinal seperti pengguna narkoba suntik, pekerja seks, dan masyarakat adat di Australia juga melaporkan pengalaman diskriminasi sebelumnya sebagai alasan utama enggan mengakses layanan kesehatan (Horwitz et al., 2022). Sementara itu, anak-anak migran penyandang disabilitas di Hong Kong menghadapi tumpang tindih stigma budaya yang menghambat akses mereka tidak hanya terhadap layanan kesehatan, tetapi juga pendidikan (Kwok & Kwok Lai Yuk Ching, 2022).

Berbagai strategi telah dikembangkan untuk mengurangi dampak negatif stigma terhadap akses layanan kesehatan. Pemberdayaan komunitas menjadi pendekatan yang efektif, seperti yang ditunjukkan oleh program yang berhasil meningkatkan sikap masyarakat terhadap pasien HIV/AIDS melalui keterlibatan langsung dengan komunitas (Winarni & Ca, 2020). Selain itu, pelatihan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan memainkan peran penting dalam membangun lingkungan pelayanan yang inklusif, di mana pasien tidak merasa dihakimi atau dikucilkan (Horwitz et al., 2022). Pandemi COVID-19 semakin memperjelas ketimpangan struktural dalam sistem kesehatan global, di mana kelompok etnis minoritas dan masyarakat miskin mengalami risiko infeksi dan kematian yang lebih tinggi akibat ketidaksetaraan sosial-ekonomi dan rasisme sistemik (Tangcharoensathien et al., 2022) & (Murray-Garcia et al., 2023). Ketidakadilan ini tidak hanya mencerminkan masalah akses, tetapi juga menunjukkan bahwa sistem kesehatan global belum mengakomodasi prinsip keadilan sosial yang setara (Ganguli-Mitra et al., 2022). Oleh karena itu, penetapan kebijakan publik dalam konteks pandemi perlu mengutamakan kelompok yang paling rentan (Nielsen & Albertsen, 2023), serta mempertimbangkan perubahan struktur

nilai dalam rantai pasok global untuk menjamin keadilan bagi pekerja (Van Buren & Schrempf-Stirling, 2022).

Berdasarkan hasil-hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa stigma dan diskriminasi bukan sekadar persoalan perilaku individual, melainkan manifestasi dari ketimpangan struktural dalam sistem sosial dan pelayanan kesehatan. Hambatan yang dihadapi oleh kelompok rentan dalam mengakses layanan kesehatan menunjukkan adanya pengaruh mendalam dari konstruksi sosial yang eksklusif dan tidak setara. Meskipun berbagai intervensi berbasis komunitas dan pelatihan profesional telah dilakukan, upaya ini belum cukup apabila tidak disertai transformasi nilai sosial dan pembenahan institusional yang menysasar akar diskriminasi. Dalam konteks ini, stigma dan diskriminasi berperan sebagai penguat ketidaksetaraan yang sistemik, mengekalkan siklus kerentanan, serta melemahkan upaya penanggulangan krisis kesehatan. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan pendekatan berbasis keadilan sosial yang menekankan sinergi antara penguatan individu dan perubahan struktural sebagai kunci menuju akses layanan kesehatan yang lebih adil dan inklusif.

b. Ketimpangan Ekonomi dan Kesenjangan Wilayah

Ketimpangan pendapatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap distribusi pembangunan ekonomi, dengan efek yang bervariasi tergantung pada wilayah dan tingkat pendapatan suatu negara. Dalam konteks negara-negara berpenghasilan menengah, pengembangan sektor keuangan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, namun juga berdampak pada ketimpangan pendapatan melalui pola hubungan berbentuk U-terbalik, di mana pada tahap awal pertumbuhan akan meningkatkan ketimpangan sebelum kemudian menurunkannya (Abbas et al., 2022). Di Turki, pertumbuhan ekonomi belum berhasil menurunkan ketimpangan antar wilayah, karena manfaat sosial lebih banyak dinikmati oleh kelompok berpendapatan tinggi (TOPUZ & SEKMEN, 2020). Sementara itu, di negara-negara BRICS, relasi antara ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan dinamika yang kompleks; sebagai contoh, Brazil mengalami dampak negatif dari ketimpangan, sedangkan Rusia dan Tiongkok mencerminkan interaksi yang lebih

beragam (Acheampong et al., 2023). Hal ini juga tercermin di kawasan Uni Eropa, di mana ketimpangan pendapatan mendorong pertumbuhan di negara maju, namun justru menghambatnya di negara berkembang, sehingga menuntut perumusan kebijakan yang disesuaikan dengan tingkat pembangunan masing-masing negara (Jianu et al., 2021).

Di sisi lain, kegagalan tata kelola pemerintahan dalam mengurangi kemiskinan wilayah tidak terlepas dari masalah sistemik seperti korupsi, ketidakstabilan politik, serta kesenjangan antar daerah. Di sub-kawasan CEMAC, korupsi secara signifikan melemahkan indikator tata kelola pemerintahan yang krusial bagi pengentasan kemiskinan (Ewane, 2023). Kualitas tata kelola juga menjadi persoalan utama dalam pengelolaan utang luar negeri di negara-negara Afrika Barat, yang memperburuk tingkat kemiskinan (Kouadio et al., 2024). Di Mozambik, kesenjangan regional dalam akses pendidikan dan layanan kesehatan menyebabkan rendahnya efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan (Libânio & Castigo, 2021). Hubungan non-linear antara kualitas tata kelola dan kemiskinan mengindikasikan bahwa suatu wilayah harus mencapai ambang efektivitas tata kelola tertentu untuk menghasilkan dampak nyata (Ochi et al., 2024). Di Indonesia, masalah implementasi seperti penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran turut memperlemah hasil program kesejahteraan di daerah seperti Bekasi (Supriyatno & Maulana, 2022).

Dari hasil penelitian di atas, terlihat bahwa ketimpangan ekonomi dan kesenjangan wilayah tidak hanya mencerminkan kegagalan distribusi hasil pertumbuhan, tetapi juga mengindikasikan adanya hambatan struktural dalam sistem tata kelola. Ketimpangan pendapatan yang tinggi cenderung menghambat dampak positif pertumbuhan ekonomi, terutama jika tidak disertai dengan reformasi kebijakan sosial dan fiskal yang inklusif. Demikian pula, ketimpangan wilayah menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional belum secara merata dirasakan di seluruh daerah. Ketika tata kelola daerah belum mencapai tingkat efektivitas yang memadai, kebijakan pengentasan kemiskinan cenderung gagal menyentuh kelompok yang paling membutuhkan. Oleh karena itu, mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan wilayah membutuhkan strategi terpadu

yang mencakup perbaikan tata kelola, distribusi keuangan yang adil, dan intervensi sosial yang berpihak pada daerah tertinggal.

c. Dimensi Rasial dan Identitas dalam Ketimpangan Struktural

Rasisme struktural merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam pembentukan kebijakan publik dan menjadi determinan utama dalam memperparah ketimpangan akses terhadap layanan kesehatan, stabilitas ekonomi, serta distribusi sumber daya. Studi menunjukkan bahwa rasisme yang terstruktur berdampak langsung pada kondisi kesehatan kronis, seperti diabetes, melalui peningkatan kadar HbA1c dan angka kematian yang lebih tinggi, terutama di kalangan komunitas kulit hitam dan Hispanik (Egede et al., 2023) & (Bailey & Robin Moon, 2020). Ketimpangan ini semakin terlihat selama pandemi COVID-19, yang memperlihatkan bagaimana kelompok minoritas etnis mengalami tingkat infeksi dan kematian yang jauh lebih tinggi akibat kerentanan sistemik (Holden et al., 2022). Kebijakan publik pun secara historis memperkuat ketimpangan ini, misalnya dengan pengurangan jaring pengaman sosial yang berdampak besar pada komunitas marjinal. Dalam konteks ini, kebijakan kesehatan yang efektif harus mempertimbangkan dimensi rasisme struktural dan mengadopsi pendekatan pengukuran inovatif guna merancang intervensi yang lebih adil (Hardeman et al., 2022). Ketimpangan rasial juga tercermin dalam angka kematian ibu, di mana perempuan kulit hitam mengalami tingkat morbiditas dan mortalitas yang lebih tinggi sebagai akibat dari ketidakadilan dalam sistem pelayanan kesehatan (Taylor, 2020).

Politik identitas dan representasi dalam narasi kemiskinan memperlihatkan dinamika yang kompleks antara penindasan struktural, gerakan sosial, dan pengalaman hidup kelompok-kelompok terpinggirkan. Teori interseksionalitas membantu menjelaskan bagaimana berbagai identitas (ras, gender, kelas) saling berinteraksi dan memengaruhi kebutuhan serta representasi politik (Brown et al., 2024). Representasi kelompok miskin dalam kebijakan sering kali dilakukan oleh aktor pengganti, seperti politisi perempuan dari Partai Demokrat atau komunitas Afrika-Amerika, yang meskipun tidak mengalami kemiskinan secara langsung, tetap memperjuangkan

agenda yang relevan. Dalam hal ini, narasi personal tentang kemiskinan menjadi instrumen penting untuk menantang asumsi dominan tentang siapa yang dianggap layak menerima bantuan. Cerita-cerita tersebut membuka tabir kekuasaan yang mempertahankan kemiskinan dan mendorong pentingnya mendengarkan suara kelompok yang terpinggirkan (Williams, 2023). Namun demikian, upaya pengakuan identitas juga dapat bersinggungan dengan logika neoliberalisme dan berisiko menutupi kesenjangan material, sehingga diperlukan keseimbangan antara pengakuan budaya dan redistribusi ekonomi (Biasoni, 2023).

Dimensi rasial dan identitas memainkan peran penting dalam mempertahankan ketimpangan struktural yang berakar dalam sistem sosial dan kebijakan publik. Ketika kebijakan kesehatan atau ekonomi tidak secara eksplisit mengakui dan mengintervensi struktur rasisme dan penindasan identitas, maka kebijakan tersebut berpotensi gagal mencapai keadilan substansial. Narasi-narasi identitas yang muncul dari komunitas termarginalkan berperan penting dalam mengungkap ketidakadilan sistemik, tetapi jika tidak diimbangi dengan distribusi sumber daya dan perubahan struktural, maka perjuangan tersebut dapat terjebak dalam pengakuan simbolik semata. Oleh karena itu, pendekatan yang menggabungkan dimensi rasial, identitas politik, dan strategi redistributif menjadi penting untuk memahami dan mengatasi akar dari ketimpangan struktural secara menyeluruh.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan struktural dalam layanan kesehatan, distribusi ekonomi, dan kebijakan publik bukan sekadar persoalan teknis, melainkan cerminan dari relasi kuasa sosial yang timpang. Stigma dan diskriminasi terhadap kelompok rentan, ketimpangan ekonomi yang melebar antar wilayah, serta penindasan berbasis ras dan identitas menunjukkan adanya sistem yang belum inklusif dan adil. Upaya penanggulangan yang bersifat parsial dan simbolik tanpa transformasi struktural hanya akan memperpanjang siklus ketidakadilan dan kerentanan.

Kajian lebih lanjut sangat diperlukan untuk mengeksplorasi pendekatan lintas sektor yang mengintegrasikan keadilan sosial, reformasi tata kelola, dan redistribusi sumber daya dalam kebijakan publik. Riset

semacam ini menjadi sangat mendesak guna merumuskan strategi intervensi yang tidak hanya responsif, tetapi juga transformatif dalam membongkar akar ketimpangan struktural.

Persembahan

First of all, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Inka Nusamuda Pratama, S.IP., M.IP., selaku dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan arahan, inspirasi, dan ide awal dalam penyusunan jurnal ini. Terima kasih pula saya haturkan kepada teman seperjuangan, yaitu Ajai Saputra yang senantiasa telah memberi dukungan moril dan bantuan selama proses penulisan.

Yang paling utama, terima kasih terdalam saya tujukan kepada kedua orang tua tercinta, yang tak henti mendoakan kelancaran dan kesuksesan saya, serta dengan tulus menjadi donatur utama dalam setiap langkah perjuangan ini. Tanpa cinta, doa, dan pengorbanan mereka, semua ini tak akan pernah terwujud.

Last but not least, saya menyampaikan penghargaan kepada diri sendiri atas keteguhan, kesabaran, dan perjuangan dalam menyelesaikan jurnal ini hingga akhir, meski harus dilalui dengan penuh tantangan.

Daftar Pustaka

- Abbas, Z., Afshan, G., & Mustifa, G. (2022). The effect of financial development on economic growth and income distribution: an empirical evidence from lower-middle and upper-middle-income countries. *Development Studies Research*, 9(1), 117–128. <https://doi.org/10.1080/21665095.2022.2065325>
- Acheampong, A. O., Adebayo, T. S., Dzator, J., & Koomson, I. (2023). Income inequality and economic growth in BRICS: insights from non-parametric techniques. *Journal of Economic Inequality*, 21(3), 619–640. <https://doi.org/10.1007/s10888-023-09567-9>
- Bahri, N., Pratama, I. N., Amirulhak, M. H., Azhari, M. M., & Yullah, N. (2024). Dinamika Sosial-Ekonomi: Analisis Kemiskinan Dan Ketimpangan Sosial Masyarakat Kabupaten Bima. *Lppm Ummat*, 3(1), 280–289.

- Bailey, Z. D., & Robin Moon, J. (2020). Racism and the political economy of COVID-19: Will we continue to resurrect the past? *Journal of Health Politics, Policy and Law*, 45(6), 937–950. <https://doi.org/10.1215/03616878-8641481>
- Beckfield, J. (2020). Rising inequality is not balanced by intergenerational mobility. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 117(1), 23–25. <https://doi.org/10.1073/pnas.1919694117>
- Bernard, A. (2023). Does Internal Migration Contribute to the Intergenerational Transmission of Socioeconomic Inequalities? The Role of Childhood Migration. *Demography*, 60(4), 1059–1088. <https://doi.org/10.1215/00703370-10826486>
- Biasoni, N. C. (2023). Las luchas que importan: tensiones e inestabilidades dentro de los movimientos de identidad. *Nuevo Itinerario*, 19(1), 23. <https://doi.org/10.30972/nvt.1916598>
- Brito, C., & da Silva, L. N. (2022). Unhoused people: stigma, prejudice, and health care strategies. *Ciencia e Saude Coletiva*, 27(1), 151–160. <https://doi.org/10.1590/1413-81232022271.19662021>
- Brown, N. E., Clark, C. J., Mahoney, A. M., Siow, O., & Strawbridge, M. G. (2024). Intersectional Identity and Representative Politics. *Politics and Gender*, 1–7. <https://doi.org/10.1017/S1743923X24000199>
- Certomà, C., Corsini, F., Di Giacomo, M., & Guerrazzi, M. (2023). Beyond Income and Inequality: The Role of Socio-political Factors for Alleviating Energy Poverty in Europe. In *Social Indicators Research* (Vol. 169, Issues 1–2). Springer Netherlands. <https://doi.org/10.1007/s11205-023-03148-z>
- Delabre, R. M., Moussa, A. Ben, Villes, V., Elkhammas, M., Ouarsas, L., Castro Rojas Castro, D., & Karkouri, M. (2022). Fear of stigma from health professionals and family/neighbours and healthcare avoidance among PLHIV in Morocco: results from the Stigma Index survey Morocco. *BMC Public Health*, 22(1), 1–10. <https://doi.org/10.1186/s12889-022-14010-1>
- Egede, L. E., Campbell, J. A., Walker, R. J., & Linde, S. (2023). Structural Racism as an Upstream Social Determinant of Diabetes Outcomes: A Scoping

Review. *Diabetes Care*, 46(4), 667–677.
<https://doi.org/10.2337/dci22-0044>

Ewane, E. B. (2023). Good governance and poverty alleviation in the cemac sub-region: A fixed effect model with driscoll-kraay standard errors technique. *Asian Journal of Empirical Research*, 13(2), 41–50.
<https://doi.org/10.55493/5004.v13i2.4831>

Ganguli-Mitra, A., Qureshi, K., Curry, G. D., & Meer, N. (2022). Justice and the racial dimensions of health inequalities: A view from COVID-19. *Bioethics*, 36(3), 252–259. <https://doi.org/10.1111/bioe.13010>

Ghosh, R., Das, N., & Mondal, P. (2023). Explanation of major determinants of poverty using multivariate statistical approach and spatial technology: a case study on Birbhum district, West Bengal, India. *GeoJournal*, 88(0123456789), 293–319.
<https://doi.org/10.1007/s10708-022-10774-6>

Gomes, M. R., da Cunha, M. S., de Souza, S. C. I., & Mourão, P. J. R. (2023). Reproduction of Parental Occupations, Income and Poverty in Brazil. *Social Indicators Research*, 167(1–3), 339–362.
<https://doi.org/10.1007/s11205-023-03103-y>

Hardeman, R. R., Homan, P. A., Chantarat, T., Davis, B. A., & Brown, T. H. (2022). Improving The Measurement Of Structural Racism To Achieve Antiracist Health Policy. *Health Affairs*, 41(2), 179–186.
<https://doi.org/10.1377/hlthaff.2021.01489>

Holden, T. M., Simon, M. A., Arnold, D. T., Halloway, V., & Gerardin, J. (2022). Structural racism and COVID-19 response: higher risk of exposure drives disparate COVID-19 deaths among Black and Hispanic/Latinx residents of Illinois, USA. *BMC Public Health*, 22(1), 1–13.
<https://doi.org/10.1186/s12889-022-12698-9>

Horwitz, R., Brener, L., Marshall, A. D., Caruana, T., & Newman, C. E. (2022). Optimising community health services in Australia for populations affected by stigmatised infections: What do service users want? *Health and Social Care in the Community*, 30(6), e3686–e3695.
<https://doi.org/10.1111/hsc.14037>

Hümbelin, O., Hobi, L., & Fluder, R. (2022). Rich cities, poor countryside? Social structure of the poor and poverty risks in urban and rural

- places in an affluent country. *Local Economy*, 37(3), 169–193. <https://doi.org/10.1177/02690942221104774>
- Jianu, I., Dinu, M., Huru, D., & Bodislav, A. (2021). Examining the relationship between income inequality and growth from the perspective of EU member states' stage of development. *Sustainability (Switzerland)*, 13(9), 0–16. <https://doi.org/10.3390/su13095204>
- Kouadio, M., Takpara, M. M., & GUÉDÉ, R. (2024). External Debt and Poverty Headcount Ratio in West African Countries: Does Governance Matter? *Regional Economic Development Research*, 5(1), 1–16. <https://doi.org/10.37256/redr.5120244297>
- Kuzembekova, R. A., & Zhanbyrbayeva, A. N. (2022). Socio-Economic Factors of Poverty in Rural Areas of Almaty Region and Prospects for their Regulation. *Economics: The Strategy and Practice*, 17(3), 81–95. <https://doi.org/10.51176/1997-9967-2022-3-81-95>
- Kwok, K., & Kwok Lai Yuk Ching, S. (2022). Navigating Stigma and Discrimination: Experiences of Migrant Children with Special Needs and Their Families in Accessing Education and Healthcare in Hong Kong. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(10). <https://doi.org/10.3390/ijerph19105929>
- Libânio, G., & Castigo, C. J. (2021). Regional Inequality and the Persistence of Poverty in Mozambique, Explained From the Perspective of the Vicious Circle of Poverty. *Brazilian Journal of African Studies / Porto Alegre / V*, 6(11), 33–59. <http://orcid.org/0000-0002->
- Maj-Waśniowska, K., & Stabryła-Chudzio, K. (2020). Wpływ wydatków budżetowych na zmniejszanie ubóstwa w Polsce. *Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing*, 23(23(72)), 95–112. <https://doi.org/10.22630/pefim.2020.23.72.8>
- Murray-Garcia, J., Ngo, V., & Garcia, E. F. y. (2023). COVID-19's Still-Urgent Lessons of Structural Inequality and Child Health in the United States. *Journal of the National Medical Association*, 115(3), 321–325. <https://doi.org/10.1016/j.jnma.2023.03.004>
- Nielsen, L., & Albertsen, A. (2023). Pandemic justice: Fairness, social inequality and COVID-19 healthcare priority-setting. *Journal of Medical Ethics*, 49(4), 283–287. <https://doi.org/10.1136/jme-2022->

108384

- Ochi, A., Saidi, Y., & Labidi, M. A. (2024). Nonlinear Threshold Effect of Governance Quality on Poverty Reduction in South Asia and Sub-Saharan Africa: a Dynamic Panel Threshold Specification. *Journal of the Knowledge Economy*, 15(1), 4239–4264. <https://doi.org/10.1007/s13132-023-01271-3>
- Pawar, M. (2023). Poverty, Policy and the Poor. *International Journal of Community and Social Development*, 5(2), 137–145. <https://doi.org/10.1177/25166026231179075>
- Pratama, I. N. (2023). Dinamika Kemiskinan di Kota Mataram: Analisis Perubahan Tingkat Kemiskinan Dalam Dekade Terakhir. *Seminar Nasional LPPM UMMAT*, 2(April), 1216–1222.
- Ribotta, S. (2023). Poverty As a Matter of Justice. *Age of Human Rights Journal*, 20(20), 1–24. <https://doi.org/10.17561/tahrj.v20.7327>
- Sucipto, A., Budiman, B., Phitaloka, T. I., & Pratama, I. N. (2024). Strategi Pengentasan Kemiskinan Berbasis Potensi Kearifan Lokal di Kabupaten Lombok Tengah. 22, 485–495.
- Supriyatno, Y., & Maulana, A. (2022). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Untuk Menanggulangi Kemiskinan Di Kabupaten Bekasi. *Governance*, 10(2), 34–48. <https://doi.org/10.33558/governance.v10i2.5638>
- Tangcharoensathien, V., Carroll, D., & Lekagul, A. (2022). Resilient and equitable recovery from the covid-19 pandemic. *The BMJ*, 376(February), 1–2. <https://doi.org/10.1136/bmj.o311>
- Taylor, J. K. (2020). Structural racism and maternal health among Black women. *The Journal of Law, Medicine & Ethics*, 48(3), 506–517.
- Titton, M., & D'Agostini, A. (2020). Juventude e pobreza: a educação e as políticas públicas sob o ideário do Banco Mundial no contexto do aumento das desigualdades sociais. *Perspectiva*, 38(3), 1–23. <https://doi.org/10.5007/2175-795x.2020.e61865>
- TOPUZ, S. G., & SEKMEN, T. (2020). Türkiye’de Hanehalkı Gelir Eşitsizliğine Etki Eden Faktörlerin Lorenz ve Yoğunlaşma Eğrileri

- ile Analiz Edilmesi ve Bölgeler Arası Karşılaştırma. *Current Research in Social Sciences*, 6(2), 103-124. <https://doi.org/10.30613/curesosc.742181>
- Van Buren, H. J., & Schrempf-Stirling, J. (2022). Beyond structural injustice: Pursuing justice for workers in post-pandemic global value chains. *Business Ethics, Environment and Responsibility*, 31(4), 969-980. <https://doi.org/10.1111/beer.12466>
- Weirstrass, J., Mwamba, M., Shiwamya, P. M., & Mudiangombe, B. M. (2022). *Does Economic Inequality Account for Cross-Country Discrepancies in Relative Social Mobility : An Empirical Investigation*.
- Williams, L. (2023). Narratives of displacement and poverty: the intersections of policy and the shared experience of the everyday. *Frontiers in Human Dynamics*, 5. <https://doi.org/10.3389/fhumd.2023.1143850>
- Winarni, S., & Ca, W. M. (2020). *Health Notions , Volume 4 Number 12 (December 2020) Program for Optimizing the Role of WPA to Reduce the Stigma and Discrimination PLWHA in The Community 411 | Publisher : Humanistic Network for Science and Technology Health Notions , Volume 4 Number 12. 4(12), 411-418.*